

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu sentral pembangunan yang sedang berkembang di Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan dan mengembangkan serta membangun kualitas sumber daya manusia. Hal ini nampak jelas tercantum dalam GBHN tahun 1998 yang menyebutkan bahwa keinginan politik pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diarahkan untuk membangun kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana bangsa, negara tentram, dan adil dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sasaran pembangunan ini kemudian ditegaskan kembali dalam GBHN yaitu pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata, material, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman tentram dan dinamis. Pentingnya peningkatan kualitas SDM juga disebabkan oleh semakin dibutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang terutama kemajuan ilmu dan teknologi.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang direncanakan menuju pada keadaan yang lebih baik yang dicita-citakan oleh masyarakat. Proses perubahan yang menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam GBHN adalah mewujudkan suatu masyarakat Indonesia seutuhnya. Pelaksanaan pembangunan diharapkan bertumpu pada trilogi pembangunan yang meliputi unsur pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang saling terkait karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa diusahakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut sehingga tercipta keseimbangan pada gerak pelaksanaannya sehingga hasil-hasil pembangunan dan segera dinikmati oleh seluruh rakyat. Terciptanya perbaikan taraf hidup yang tercermin antara lain peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, terpenuhi kebutuhan pokok, serta berkurangnya angka kemiskinan.

Pembangunan yang dilakukan oleh seluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa salah satunya yaitu melalui pembangunan SDM yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Pembangunan SDM ini salah satunya dengan cara peningkatan kualitas pendidikan mengingat pendidikan adalah sebagai salah satu dasar untuk menghasilkan SDM yang

Peningkatan kualitas SDM ini menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan yang mengarah pada sektor pendidikan, yaitu menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesiapan dan kemandirian SDM. merupakan penentu utama dalam pelaksanaan pembangunan dan tentu pemerintah daerah kabupaten Kaur tengah sadar akan kekurangan kualitas SDM mengingat rata-rata kualitas pendidikan masyarakat masih rendah terutama kualitas pendidikan dasar.

Pendidikan diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai media menuju kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan hanya milik suatu institusi atau kelompok tertentu, tetapi milik semua. Karena setiap manusia pada hakekatnya memiliki daya belajar dan membutuhkan pendidikan, maka pendidikan bukan otoritas sekolah saja dalam pelaksanaannya. Pendidikan milik semua manusia yang hidup dan mendambakan belajar. Karena milik semua maka penyelenggaraan pendidikan pun merupakan tanggung jawab bersama.¹

Diberlakukannya Otonomi Daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 2004, Memberikan ruang luas bagi lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah), khususnya di daerah untuk mencari format atau model sendiri bagi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil sesuai kebutuhan masing-masing. Tentu kebijakan-kebijakan otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikannya

¹ Svanikani HR. *Titik Temu Dalam Dunia Pendidikan*. Nuansa Madani. Jakarta. 2002. hal 7

membawa konsekuensi kepada kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan diambil selanjutnya.²

Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kualitas penduduk yang menguasai teknologi modern dan informasi. Di dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa “pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional “pengertian ini diperluas dengan tidak membatasi pada pengajaran saja melainkan juga memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan suatu bangsa yang bertaqwa pada tuhan YME memelihara budi pekerti kemanusiaan yang memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dibidang pembangunan nasional mengusahakan:

1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang berkualitas.
2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, ideologi, yang bertentangan dengan Pancasila.

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara RI agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap rakyat untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pelajaran “. Sistem pendidikan nasional memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan jenis kelamin, agama, suku bangsa, latar belakang sosial dan kemampuan ekonomi.

Secara manajerial konsep “*Link dan Mach* (kertekaitan dan kesepadanan)” yaitu pengembangan konsep pendidikan yang menekankan pada penguasaan sains dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi harus dikaitkan dengan aspek-aspek pengelolaan yang mengaju pada keharusan dan tanggung jawab kemanusiaan untuk berupaya mengembangkan sains dan teknologi tidak secara terpisah dengan pendidikan etika atau moral, seni, olah raga, sehingga tercipta keseimbangan dan memiliki wawasan moral dan etis.³

Mutu atau kualitas pendidikan akan ditandai oleh kemampuan program atau lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan cakap

yang dibutuhkan oleh pasaran kerja (*labour market*) meskipun demikian, asumsi mekanisme pasar bebas sesungguhnya jarang diterapkan kepada bidang pendidikan terutama apabila pendidikan dipandang umum "*public good*" daripada sebagai komunitas pasar. Dalam hal ini persamaan hak keadilan dan pendistribusian kesempatan memperoleh pendidikan menjadi sangat penting, efisien ekonomi menjadi kurang penting karena tipe program pendidikan dipandang sebagai "*public service*" jadi kesempatan untuk memperoleh pendidikan harus diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Persoalan mutu pendidikan dinilai dari segi apakah penyediaan pendidikan itu efisien secara teknis didistribusikan secara merata bagi seluruh masyarakat.⁴

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pasti akan menghadapi hambatan dan persoalan yang dapat mempengaruhi, baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun persoalan itu sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat: perubahan susunan gaya hidup, harapan serta aspirasi masyarakat dan sistem baru dalam pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya.
2. Budaya: pergantian dan pergeseran gagasan, perubahan peranan wanita, struktur keluarga.
3. Lingkungan hidup: kelangkaan sumber alam, peristiwa dan bencana alam

4. Informasi: ruang hidup dan kualitas informasi, konsep baru tentang bagaimana sesuatu itu berpungsi.
5. Kebudayaan: penyebaran dan pengalihan ide, nilai dan kebiasaan dari suatu unsur kebudayaan kepada yang lainnya.

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Kaur yaitu berhubungan dengan kebutuhan yang berkenaan dengan fasilitas dan lingkungan sekolah (gedung, sarana belajar belajar, guru, pengelolaan, proses belajar, serta kurikulum) dan tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan juga masih sangat rendah.⁵ Alasan dipilihnya Kabupaten Kaur sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut sebelumnya belum pernah dijadikan tempat penelitian peneliti lain dan permasalahan mengenai peningkatan kualitas di kabupaten tersebut mutlak diperlukan mengingat pentingnya pendidikan dasar dalam membentuk kualitas generasi penerus bangsa.

Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melaksanakan program-program peningkatan kualitas pendidikan antara lain:

- a. Peningkatan mutu pendidikan
- b. Peningkatan SDM (sumber daya manusia)
- c. Penyediaan jasa layanan dengan cara program PLS (pendidikan luar sekolah).

⁵ Sunarii, anggota humas Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, hasil wawancara tanggal 1 Juni 2008

Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Kaur terangkum sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan
di Kabupaten Kaur Tahun 2006 / 2007

No	Ruang Kelas	Jumlah Keseluruhan	Kondisi	Jumlah
1	TK	35 Ruang	Baik Rusak Ringan Rusak Berat	35 Ruang - -
2	SD	818 Ruang	Baik Rusak Ringan Rusak Berat	561 54 203
3	MI	48 Ruang	Baik Rusak Ringan Rusak berat	34 6 8
4	SMP	165 Ruang	Baik Rusak Ringan Rusak Berat	87 35 43
5	SMP Terbuka	9 Ruang	Baik Rusak Ringan Rusak Berat	9 - -
6	MTS	30 Ruang	Baik Rusak ringan Rusak berat	- - 30

Sumber dinas pendidikan kabupaten kaur

Partisipasi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada era otonomi daerah mencakup dua aspek yaitu: aspek mutu dan aspek pemerataan pendidikan. Aspek mutu pendidikan harus selalu ditingkatkan. Indikator rendahnya kualitas pendidikan di kabupaten kaur sebagai berikut: Dari aspek akademik dan non akademik, kedisiplinan, kreativitas dan kemandirian siswa belum mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan

Menurut Suparji, berbagai hal yang menjadi kondisi di Kabupaten Kaur adalah kualitas dan kuantitas guru masih rendah, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih sangat kurang, dari aspek akademik dan non akademik, kreativitas dan kemandirian siswa belum mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, dan kondisi lingkungan sekolah.

1. Kualitas dan kuantitas guru masih rendah. Kualitas merupakan kondisi kredibilitas dari para guru yang ada, sedangkan kuantitas adalah jumlah dari individu yang menjadi guru. Guru yang berkualitas pada dasarnya akan mampu mendidik siswa menjadi lebih baik yang berarti akan menjadikan siswa semakin berkualitas juga.
2. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih sangat kurang. Hal itu nampak dari sedikitnya jumlah siswa yang melanjutkan sekolah hingga keperguruan tinggi.
3. Dari aspek akademik dan non akademik, kreativitas dan kemandirian siswa belum mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan. Diketahui bahwa siswa di Kabupaten Kaur masih sedikit yang meraih prestasi tinggi hingga membawa nama "harum" dari Kabupaten Kaur.
4. Kondisi lingkungan sekolah menyangkut gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga masih belum memadai karena sarana dan

prasarana sekolah sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.⁶

Pelaksanaan wajib belajar dan penanaman kesadaran pentingnya sekolah (pendidikan) belum begitu berhasil dikarenakan keadaan masyarakat dan sistem pendidikan yang ada. Aspek pemerataan pendidikan, pemerintah juga harus menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh anak dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini bisa dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan memonitor dan evaluasi program secara reguler.

Adapun permasalahan yang terkait dengan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Kaur, Pendidikan Dasar masih memerlukan penanganan serius dan berkala. Salah satu penentu keberhasilan dari pelaksanaan suatu program ditentukan oleh intensitas pemahaman para pelaku program tersebut.

Ada 5 permasalahan mendasar pendidikan yang masih memerlukan membutuhkan penanganan yang terus menerus dan berkelanjutan yang harus dilakukan Ditjen pendidikan dasar dan menengah. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Akses Pendidikan

Terkait dengan akses pendidikan, di beberapa wilayah masih ditemui adanya komunitas yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai.

⁶ Mohammad Husein Husein, *Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 16

Khususnya komunitas yang dikategorikan hidup dibawah garis kemiskinan, tapi angkanya tidak begitu besar.

b. Permasalahan Relevansi Pendidikan

Permasalahan relevansi pendidikan, merupakan permasalahan Nasional yang terkait sejauh mana upaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa, perubahan tersebut harus direspon oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan masih belum bisa mengatasi kekurangan guru secara cepat dan merata.

c. Permasalahan Kualitas Pendidikan

Adapun permasalahan yang terkait dengan kualitas pendidikan ini dapat dicermati pada lembaga-lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar yang diharapkan, oleh karena itu perlunya upaya terpadu yang sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak.

d. Permasalahan Efektifitas dan efisiensi dan manajemen pendidikan.

Kemampuan manajerial dalam mengelolah pendidikan merupakan permasalahan yang terkait dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah yang diposisikan sebagai manajer, masih perlu ditingkatkan profesionalitasnya. Efektifitas dan efisiensi manajemen sekolah dapat terwujud apabila pihak sekolah mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan dan mengembangkan mekanisme pengendalian secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Dibentuknya komite sekolah dimungkinkan agar adanya organisasi masyarakat

yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

e. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan masih jauh dari harapan terutama di pedesaan. Oleh karena itu upaya membangun kesadaran kritis dalam penyelenggaraan pendidikan kunci sukses menangani permasalahan. Selain itu perlu kemitraan yang sinergis antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Selain dari permasalahan diatas yang menyebabkan lemahnya kualitas pendidikandasar diKabupaten Kaur adalah tingkat pendidikan guru terutama guru pendidikan dasar yang hanya tamatan D2 bukan tamatan sarjana karena mengingat guru merupakan ujung tombak dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan masa depan bangsa. Dalam program pembelajaran disekolah guru menduduki posisi sentral, guru yang berkualitas sangat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan.

Didalam kelas gurulah yang menjadi subyek utama dalam menciptakan suasana kelas. Meski upaya perbaikan kurikulum dilakukan terus menerus tanpa dukungan guru yang kompeten pada bidangnya maka hasilnya kurang bermanfaat karena tidak akan sampai kepada peserta didik. Oleh karena itu guru yang berkualitas sangat diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas

Oleh karena itu dengan adanya alasan tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besarnya peran Dinas pendidikan Kabupaten Kaur dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Praktek diskriminasi terhadap perempuan dihilangkan baik yang terdapat pada muatan kurikulum khususnya pada pendidikan agama, olah-raga, dan pendidikan budi pekerti dengan menanamkan kepada guru tentang pemahaman sadar gender. Demikian juga alokasi dan distribusi anggaran pendidikan harus menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi⁷. Pendidikan dasar dianggap penting karena beberapa hal:

- a. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena pendidikan dasar merupakan fondamen dari masyarakat yang berkualitas. Jika fondamennya keropos maka tidak mungkin dibangun suatu bangsa dan masyarakat yang kokoh di atasnya.
- b. Pendidikan dasar adalah tuntutan konstitusi pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan kepada negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran sehingga pendidikan itu menjadi hak bagi setiap warga negara. Disamping itu warga negara juga berhak memperoleh pendidikan

⁷ Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, hal 34

³ Winarno Surachman Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik Tarjita Bandung 1990 hal 34

yang lebih baik sesuai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia.

- c. PP No 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar, maka landasan yuridis dan operasional telah tersedia sebagai langkah pertama secara mantap untuk mewujudkan cita-cita proklamasi ialah mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas. Dengan diundangkannya pendidikan dasar menjadi 9 tahun mewujudkan tekad bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.

Kualitas pendidikan dasar akan mempengaruhi kualitas generasi muda suatu bangsa, sehingga penting bagi setiap wilayah untuk memajukan kualitas pendidikannya. Pentingnya kualitas pendidikan dasar pada suatu daerah menyebabkan peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar sehingga mengambil judul "Peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar".

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah "bagaimana peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar tahun

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah kabupaten kaur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten kaur dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kaur
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten kaur agar dapat memberikan solusi yang terbaik dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar.
 - b. Memberikan informasi sejauh mana keseriusan pemerintah kabupaten kaur dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Manfaat bagi masyarakat terhadap kualitas pendidikan
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan kualitas pendidikan dikabupaten kaur.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan

3. Manfaat bagi penulis

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri atas uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep dan definisi tertentu. Didalam penelitian ini dikemukakan teori-teori yang menjadi acuan bagi peneliti yang dilakukan Sofyan Efindi dan Masri Singarimbun (1989:37) mendefinisikan teori sebagai serangkaian asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Dengan kata lain teori adalah sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial atau alam.

Menurut Koenjaningrat berpendapat teori merupakan pernyataan mengenai sebab –akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertntu dalam masyarakat.⁸

⁸ Masri singarimbun, dan Sofyan Efindi, *Metode Penelitian Survei*, LP3 ES, 1989, Jakarta, Hal 27

1. Peranan

Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki perilaku tertentu pula. Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peran sehingga peran aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang muncul.

Peranan dapat pula diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta didominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dalam hubungan dengan kelompok yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Ada banyak sekali pengertian peranan yang dikemukakan oleh para pakar tetapi disini ditulis beberapa pengertian peranan antara lain :

a. Menurut WJS. Puroratminto

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)

b. Sussanto mengemukakan bahwa peranan itu mengandung tiga hal penting yaitu:⁹

- 1) Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah sesuatu konseppiral apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Peranan yang dilakukan oleh suatu dinas dapat meliputi peran pemberdayaan, pengaturan, serta pelayanan. Peran pemberdayaan berarti bahwa dinas yang ada berusaha memberdayakan sumber daya yang ada dalam suatu dinas baik sumber daya manusia maupun selain sumber daya manusianya. Pemberdayaan berarti bahwa dinas yang ada harus mampu memaksimalkan potensi yang ada demi pencapaian tujuan secara efektif.¹⁰

Peran pengaturan merupakan peran untuk mengatur apa yang ada agar sesuai dengan peraturan yang ada. Aturan yang ada diharapkan mampu memudahkan para karyawan dalam bekerja. Pekerjaan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan segera. Kendala yang ada akan menjadi minimal apabila peran pengaturan dapat terealisasi secara benar.

¹⁰ Yamin, Z. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Ekhasia, Yogyakarta, 2001. Hal 32.

Pada dasarnya pelayanan merupakan peran yang mendasar dalam suatu kegiatan kerja. Peran pelayanan berarti bahwa organisasi harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya sehingga konsumen merasa puas dan pada akhirnya mau menikmati kembali pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penyedia barang atau jasa. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha dapat dipersepsikan secara berbeda oleh konsumen. Persepsi positif yang ada dalam diri konsumen mengenai kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pengusaha tersebut.

Disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan. Peranan memiliki tiga hal penting yaitu peran pemberdayaan, peran pengaturan, serta peran pelayanan.

2. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah Suatu instansi yang dibentuk pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu bidang kegiatan tertentu guna mewujudkan visi dan misi untuk pembangunan daerah

Dinas daerah kabupaten merupakan unsur pelaksana pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin seorang kepala daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pada Dinas daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah (UPDT) Kabupaten untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Sesuai dengan pemerintahan di Indonesia yang membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah di daerah mengenal dua bentuk pemerintahan yaitu daerah wilayah otonom dan wilayah Administratif. Dalam UU Nomor 22 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Kabupaten dan daerah kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten dan Daerah kotala yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat dan mengetahui persis kondisi daerahnya.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemerintah dipegang oleh pemerintah Daerah yang terdiri dari :Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya yang bekerja sama dengan DPRD. Peranan pemerintah Kabupaten

adalah aktivitas atau kegiatan atau keikutsertaan yang dilakukan oleh aparatur atau pejabat pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan kehidupan pemerintah di daerah. Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan fungsi pemerintah hanya saja cakupannya lebih kecil, untuk fungsi pengaturan (regulasi) yaitu fungsi pemerintahan dalam membuat peraturan dengan mengeluarkan. Yang kedua fungsi pemberdayaan (Empowering) dalam hal ini yang diutamakan adalah pemberdayaan aparat pemerintahnya.

Jadi sebelum meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan maka kualitas aparatnya harus ditingkatkan terlebih dahulu. Fungsi pelayanan dengan dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah tidak membebani masyarakat, caranya yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana baik dibidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.¹¹

Pemerintah daerah merupakan badan organ atau aparatur yang berwenang mengatur, menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pemerintahan suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam mengurus rumah tangganya, pemerintah daerah mempunyai inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga atas dasar kebijaksanaan sendiri atau dengan kata lain otonomi daerah.

Dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang pokok Pemerintahan di daerah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lain sebagai badan eksekutif, daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Maka daerah mempunyai kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang untuk menentukan dan Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Orang yang berbeda akan mengartikannya secara beda pula. Beberapa definisi yang kerap kita jumpai antara lain :

1. Kesesuaian dengan tuntutan atau prasyarat
2. Kecocokan untuk pemakai
3. Penyempurnaan/perbaikan berkelanjutan
4. Bebas dari kerusakan /cacat.
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
6. Melakukan segala sesuatu benar sejak awal.
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Dari uraian diatas kualitas memang sebuah kata yang sulit untuk didefinisikan, tetapi orang akan mengetahui bila melihatnya sebagai hasil

orang mengkaitkan kualitas dengan produk barang atau jasa, tetapi sebenarnya kualitas lebih dari itu, kualitas juga termasuk proses lingkungan dan manusia. Kualitas merupakan sebuah kata yang bagi para penyedia jasa adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Keunggulan dan kelebihan suatu produk atau jasa tergantung dari kualitas yang diberikan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat atau belum.

Berkaitan dengan pendidikan, peningkatan kualitas mengupayakan terjalinnya kemitraan antara pemerintah, pendidikan dan dunia bisnis. Karena indikator dari keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip penyelenggaraan Pemda adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan didaerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah awal januari 2001 melalui UU Nomor 22 tahun 2004, memberikan ruang gerak bagi lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah) khususnya di daerah untuk mencapai fungsi atau

model sendiri bagi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya Otonomi pendidikan berada ditingkat sekolah. Peran pemerintah lebih ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan berjalan dengan secara efektif dan efisien. Pemerintah kabupaten dalam menjalankan fungsinya tidak berbeda jauh dengan fungsi pemerintah, hanya saja ruang lingkungannya lebih kecil. Dinas pendidikan mempunyai kewenangan atas dasar TK, SD, SMP, SMU, SMK, dan pendidikan luar sekolah (pemuda dan olah raga dan kebudayaan).

Peran dinas pendidikan sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung terhadap kualitas pendidikan yang ada didaerah dan tugas Dinas pendidikan merumuskan/merencanakan serta mengimplementasikan kurikulum pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerah. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan pendidikan yang terus berkembang sesuai zaman.

Undang-undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara

Tugas pokok dan fungsi pokok dinas pendidikan Kabupaten Kaur diatur oleh PP: No 15 tanggal 5 maret 2005 yaitu : Mengurusi dan mengawasi tentang TK, SD, SMP, SMU, dan pendidikan luar sekolah (pemuda dan olah raga dan kebudayaan) yang berada diwilayah Kabupaten Kaur. Dinas pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dinas pendidikan Kabupaten Kaur melakukan tugas pokok otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibidang pendidikan nasional, pemuda, olah raga dan pendidikan luar sekolah. Dinas pendidikan melaksanakan fungsi sesuai dengan PP No :15 tanggal 5 maret 2005 dan dan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Membantu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, di tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta
- 2) Membantu pengadaan tenaga pengajar
- 3) Menyusun kurikulum ditingkat TK, SD SMP, SMA dan SMK
- 4) Mengadakan pembinaan terhadap sekolah swasta, pendidikan luarsekolah, pemuda dan olah raga
- 5) Memantau dan mengevaluasi proses belajar mengajar

Kuantitas diartikan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau konfirmasi terhadap kebutuhan atau persyaratan (confirmation to the requirements).¹² didasarkan atas kemampuan program atau lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan cakap yang dibutuhkan oleh pasaran kerja. Dengan demikian kemitraan antara pemerintah, pendidikan dan dunia bisnis harus betul-betul memanfaatkan potensi lokal sebagai basis pengembangan lembaga pendidikan dengan mengakomodasi kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan profesionalisme para pegawai atau para pejabat daerah.¹³

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan peningkatan kualitas merupakan suatu usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengembangkan potensi-potensi dan aspek-aspek yang tersedia dan merupakan suatu usaha yang ditempuh dengan cara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak-pihak terkait.

Karena otonomi pengelolaan pendidikan berada ditingkat sekolah maka peranan pemerintah adalah memberikan pelayanan dan dukungan kepada sekolah agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien.

¹² Vincent Gasperz, *Manajemen Kualitas, Penerapan Konsep-Konsep Dalam: Manajemen Bisnis Total*, Jakarta, 1997, Hal.5.

¹³ Syaukani HR, *Titik Temu DALAM Dunia Pendidikan*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002, hal.36.

Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan ini hanya mencakup dua aspek yaitu mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan mutu standar pendidikan dan akan berupaya agar semua siswa dapat berprestasi setinggi mungkin. juga berupaya agar semua sekolah dapat mencapai standar minimum mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antar sekolah dalam suatu lokasi sekecil mungkin.

Pemerintah juga menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh siswa dari semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijaksanaan umum, pelayanan teknis dan monitoring program secara reguler. Praktek diskriminasi terhadap siswa perempuan dan sekolah swasta baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak, baik yang terjadi pada level kebijaksanaan maupun implementasi harus dihapuskan. Demikian juga alokasi dan distribusi anggaran pendidikan harus menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi.

Dalam pengertian sederhana dan umum pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani dan rohani sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan atau dengan kata lain pendidikan dapat diartikan sebagai suatu peradaban bangsa itu yang dikembangkan atas dasar pandangan bangsa itu

sendiri yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau sebagai cita-cita dan tujuan pendidikannya.

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan, pendidikan yang dikelola dengan tertib dan teratur, efektif, efisien akan mampu mempercepat jalannya pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita sesuai dengan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Pendidikan dibagi atas tiga kategori yaitu:

a. Pendidikan formal

Menurut Noeng Muhajir pendidikan formal diartikan sebagai berikut:

”Pendidikan adalah yang terstruktur mengenai unsur waktu dan urutan pendidikan formal mempunyai kurikulum standar akademi serta sistem ujian yang relatif ketat¹⁴.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai struktur yang jelas, memiliki aturan yang ketat berstruktur tingkatanya serta memiliki pengelolaan pendidikan yang teratur. Dan pendidikan formal ini telah

¹⁴ Noeng Muhajir, *Konsep Pendidikan: Adanya Insang Pembangunan Masyarakat, Perkembangan*

diatur pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraannya serta telah memiliki fasilitas yang memadai.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang penyelenggaranya dilakukan diluar pendidikan formal yang sifatnya tidak terlalu ketat dalam peraturan dan pembentukan sanksi yang jelas. Isi pendidikannya banyak bersifat sebagai penunjang kekurangan dari sistem pendidikan yang telah ada. Terutama untuk menambah keterampilan dari peserta didik walaupun dengan keterbatasan fasilitas yang dimilikinya

Namun tidak menghalangi melahirkan manusia Indonesia yang terampil dan berkualitas serta berpengetahuan tinggi. Menurut Sanapiah, pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

"pendidikan nonformal adalah penyelenggara pendidikan persekolahan, isi pendidikannya terprogram, ada konsekuensi materi dan interaksi belajar yang sedikit yang banyak terkontrol serta adanya kredensial.¹⁵

Dari pengertian diatas maka ciri-ciri pokok pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

1. Ada umumnya tidak terbagi dalam jenjang.
2. Waktu penyampain diprogramkan pendek

¹⁵ Enjal Sanapiah, *Pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Dalam Pendidikan dan Pembangunan Sosial*

3. Usia pada umumnya tidak sama.
4. Para siswa pada umumnya selalu berorientasi pada jangka pendek praktis.
5. Adanya kredensial (ijazah, sertifikat atau program).

c. Pendidikan informal

Secara umum pendidikan informal pendidikan yang diperoleh manusia sejak ia lahir sampai kematiannya dan dilakukan dengan sadar. karenanya pendidikan ini penting untuk lebih mengenal diri dan lingkungan serta mampu beradaptasi. Pendidikan ini juga akan menempa manusia dalam segala tantangan hidup.

Menurut Sanapiah pendidikan informal adalah sebagai berikut:

” Segala macam, penyelenggaraan aktifitas melembaga yang fungsi pendidikannya berlangsung secara wajar dan lebih bersifat sebagai pengalaman individual mandiri dan tidak memiliki kredensial nilai ”.¹⁶

Lingkungan internal, terdiri dari variabel kekuatan, kelemahan yang ada dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak variabel itu meliputi budaya dan sumber budaya organisasi.

- a. Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada diluar organisasi dan berpengaruh terhadap orang dalam mencapai tujuan

- b. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang ada dalam organisasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

Aspek membantu atau merintanginya pencapaian misi orang terdiri 3 kategori:

- 1) Sumber daya /input: seberapa besar SDA dan SDM yang dimiliki oleh organisasi.
- 2) Strategi/proses rencana strategi yang ditetapkan organisasi itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
- 3) Kinerja/output: seberapa besar kemampuan dan kemauan kinerja dari SDM yang ada pada organisasi itu¹⁷.

Dalam peraturan pemerintah RI No 28 Tahun 1990. Disebutkan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di SD dan SLTP atau pendidikan yang sederajat.

Ciri-ciri efisiensi dari pendidikan dasar menurut tim pengarah dan tim materi peningkatan wawasan kependidikan guru menyebutkan

- a. Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang berarti pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali.

¹⁷ Wathaha, E.C. *System Analysis and Design Traditional Structural and Advanced Concepts And*

- b. Pendidikan dasar berlangsung selama sembilan tahun yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SLTP atau yang sederajat.
- c. Pendidikan dasar tidak bersifat *inifrom*, meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan umum tidak semua peserta didik mendapatkan materi kurikulum yang sama seluruhnya.
- d. Pendidikan dasar dilakukan di jalur sekolah dan di luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan.
- e. Lulusan pendidikan dasar adalah setara lulusan pendidikan jalur sekolah beserta wahananya sehingga memberikan keleluasan gerak bagi peserta didik¹⁸.
- f. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berfungsi memberi bekal dasar pembangun kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga berfungsi untuk mempersiapkan mengikuti pendidikan belajar menengah, karena itu bagi setiap rakyat Indonesia harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, dan tiap-tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan yang sekurang-kurangnya mampu membekali dirinya dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan ini dilaksanakan jatuh antara umur 6-12 tahun.¹⁹

Pendidikan dasar memiliki beberapa tujuan pokok yaitu mempersiapkan anak didik menjadi (1)orang yang bermoral (2)seseorang warga negara yang

¹⁸ Tim Dosen IKIP, *Dasar-Dasar Kependidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hal.5.

¹⁹ Emod Eason, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Binaka Cipta, Jakarta, 1997, hal.24.

mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang warga negara (3)Orang dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan dengan cara memberikan keterampilan dasar yang umum bagi semua pekerjaan didalam suatu masyarakat kepada anak didik.²⁰

Biasanya isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian pelajaran tentang:

- a. Pendidikan pancasila
- b. Pendidikan agama
- c. Pendidikan kewarganegaraan
- d. Bahasa Indonesia
- e. Membaca dan menulis
- f. Matematika
- g. Pengantar Sains dan Teknologi
- h. Ilmu bumi
- i. Sejarah nasional dan sejarah umum
- j. Kerajinan tangan
- k. Pendidikan jasmani dan kesehatan
- l. Mengambar

m. Bahasa Inggris²¹

4. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dengan cara sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu:
 - a. Pelaksanaan KKG(kelompok kerja guru) dan KKS (kelompok kerja kepala sekolah.
 - b. Sosialisasi dana BOS
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
 - a. Diklat CAKEP(calon kepala) dan Diklat CAWAS(calon pengawas)
 - b. Perluasan kesempatan belajar
 - c. Peningkatan kualitas guru
 - d. Pelatihan / Penataran
 - e. Peningkatan Kuantitas Guru
3. Penyediaan jasa layanan
 - a. Pelaksanaan program kejar paket A
 - b. Pelaksanaan program kejar paket B

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah kata, frase, atau kalimat yang mengungkap keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Definisi juga dapat diartikan sebagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit. Jadi definisi konsepsional adalah pengertian ide atau pengertian mengenai kajian untuk menerangkan fakta atau kondisi obyektif.

1. Peranan

Peranan adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi, dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan. Peranan dalam penelitian ini merupakan upaya peningkatan mutu, peningkatan sumber daya manusia, dan penyediaan jasa layanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

2. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah Suatu instansi yang dibentuk pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu bidang kegiatan tertentu guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Dinas daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seseorang kepala daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

3. Dinas Pendidikan

Adanya pemberlakuan otonomi daerah UU No 22 tahun 2004, memberikan ruang gerak bagi lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah), khususnya di daerah untuk mencari format dan atau model sendiri bagi kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya masing-masing. Peran pemerintah lebih ditekankan pada pelayanan agar proses pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan fungsinya tidak berbeda jauh dengan fungsi pemerintah, hanya saja ruang lingkungannya lebih kecil. Dinas pendidikan kewenangan atas dasar TK, SD, SMP, SMU, SMK, dan pendidikan luar sekolah (komunitas dan olah raga dan kebudayaan). Peran

Dinas pendidikan sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung terhadap kualitas pendidikan yang ada di daerah dan tugas dinas pendidikan merumuskan atau merencanakan serta mengimplementasikan kurikulum pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerah. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan pendidikan yang terus berkembang sesuai dengan zaman.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

Peningkatan kualitas adalah merupakan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengembangkan potensi-potensi dan aspek-aspek yang tersedia dan merupakan suatu usaha yang ditempuh dengan cara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak-pihak terkait. Sedangkan pendidikan dasar adalah pendidikan yang berfungsi memberi bekal dasar pembangun kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat pendidikan dasar juga berfungsi untuk mempersiapkan mengikuti pendidikan belajar menengah, karena itu bagi setiap rakyat Indonesia harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, dan tiap-tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan yang sekurang-kurangnya mampu membekali dirinya dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar.

G. Definisi Operasional

Tugas pokok dan fungsi pokok dinas pendidikan Kabupaten Kaur diatur oleh Peraturan Pemerintah No.15 tanggal 5 maret 2005 yaitu : Mengurusi dan mengawasi tentang TK, SD, SMP, SMU, dan pendidikan luar sekolah (pemuda dan olah raga dan kebudayaan) yang berada diwilayah Kabupaten Kaur.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Tahun 2006/2007 sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu:

a. Pelaksanaan KKG (kelompok kerja guru) dan KKS (kelompok kerja kepala sekolah.

b. Sosialisasi dana BOS

2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

a. Diklat CAKEP(calon kepala) dan Diklat CAWAS(calon pengawas)

b. Perluasan kesempatan belajar

c. Peningkatan kualitas guru

d. Pelatihan / Penataran

3. Penyediaan jasa layanan
 - a. Pelaksanaan program kejar paket A
 - b. Pelaksanaan program kejar paket B

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dimana metode deskriptif adalah adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²² Peneliti deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.
- b) Data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan digambarkan dalam bentuk tulisan.

2. Unit Analisa

Yang menjadi unit analisa data dalam penelitian ini adalah: Dinas pendidikan kabupaten kaur sebagai institusi atau lembaga. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala pendidikan dasar, humas Dinas Pendidikan, Kabid Dinas Pendidikan Dasar, Kasubag Keuangan, Kasubag Kepegawaian, serta beberapa siswa SD.

3. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah metode deskriptif yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang penulis peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data sekunder adalah semua informasi yang penyusun peroleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.